

BAB IV

KABUPATEN JAYAPURA DALAM KONTEKS PAPUA

Bab ini akan mendiskusikan situasi umum Kabupaten Jayapura yang menjadi lokasi penelitian, meliputi penjelasan mengenai posisi geografis, keadaan demografis serta kondisi kehidupan sosial, politik serta ekonomi sebagai subjek penelitian. Gambaran tersebut, pada gilirannya, berguna dalam memahami pola-pola interaksi antar sesama migran maupun antara migran dengan Orang Asli Papua. Meski demikian, membicarakan Kabupaten Jayapura tentu tidak dapat dilepaskan dari konteks Papua keseluruhan. Oleh karena itu, sebelum membahas gambaran umum Kabupaten Jayapura, maka disertasi ini juga akan memaparkan sekilas mengenai tahapan-tahapan penting sejarah Papua, yang berdampak signifikan dalam perubahan masyarakat, baik secara struktural maupun kultural.

4.1. Papua dari Masa ke Masa

4.1.1. Masa Sebelum Kolonialisme

Sebelum memasuki era modern, masyarakat di wilayah Papua pada umumnya adalah pemburu dan peramu (Boelars, 1986: 3). Mereka hidup dari mengambil apa yang sudah disediakan oleh alam sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Alam Papua sangat kaya, sementara kebutuhan hidup waktu itu amatlah sederhana. Hal ini memunculkan sikap hidup bersahaja, mengutamakan kebersamaan dan saling percaya. Sikap-sikap luhur itu pula yang membuat masyarakat Papua di masa lalu mudah menerima dan mempercayai pihak-pihak luar yang masuk ke wilayah mereka.

Banyak penjelajah dan peneliti membuktikan bahwa interaksi masyarakat “asli” Papua dengan para migran sesungguhnya sudah terjadi sejak lama. Kitab Negara Kertagama karya Mpu Prapanca dari Majapahit menyebutkan bahwa pada abad ke 14 Majapahit sudah menguasai wilayah *Wwunin* (Onim),

Fak-Fak. Wilayah yang dimaksud itu terletak di barat daya Kepala Burung (Muller, 2008: 85; Mealey, 1996:42). Kemudian Tahun 1663 Nicolaes Vinck, seorang penjelajah dari Eropa, menyaksikan komunitas di pesisir barat daya Papua telah berhubungan dengan komunitas yang ada di bagian barat Berau (Teluk Bintuni). Demikian pula dengan John MacCluer yang berlayar sampai di Kepala Burung dan Teluk Berau pada tahun 1791. Dia menyebutkan masyarakat setempat sudah melakukan transaksi dagang antara sesama penduduk yang berada di sepanjang pesisir pantai selatan Kepala Burung sampai ke barat laut Inanwatan dan ke arah pegunungan Ayamaru (Timmer dan Ballard, 2003).

Catatan sejarah bangsa-bangsa luar yang datang ke Papua pada umumnya karena motif untuk mencari hasil bumi berupa rempah-rempah. Sejalan dengan pencarian hasil bumi tersebut, ternyata kemudian wilayah Papua juga menyimpan banyak kelebihan mulai keindahan alam sampai pada hasil tambang emas, gas alam dan sejumlah hasil bumi lainnya, sehingga para orang luar tertarik bahkan sampai memberi tanda bagi Papua atau nama. Sepanjang sejarah nama “Papua” telah tercatat pada tahun 200 setelah Masehi)1800 tahun yang lalu) ada seorang ahli Geografi yang bernama Ptolemy dari Yunani, dan menamai “Labadios”, artinya pulau yang indah. Tahun 600-an sesudah Masehi, para pelaut Persia, Gujarat dan India menyebutnya Dvipanta” atau “Samudra” yang berarti “Ujung Samudra”, akhir tahun 600 sesudah masehi (1400 tahun lalu) Sriwijaya menamakan Papua sebagai “Janggi”, Orang tiongkok pada tahun 800 Masehi memberi nama “Tungki”, demikian pula orang hindu menamai Papua “Negara Ujung lautan”(Wally: 2018, 56).

Pada tahun 1528 seorang komandan armada Spanyol yang bernama Alvaro de Saavedra, sebagai gubernur, utusan Spanyol di Tidore. Kedatangan mereka terutama untuk mencari rempah-rempah (Djafaar, 2006). Disamping karena misi Gold, Gospel dan Glory. Papua dianggap pula sebagai milik Spanyol sejak tahun 1554 hingga tahun 1663 (Bachtar, 1963:56). Dan

diberi nama Nueva Guinea, artinya milik mahkota Spanyol sampai penguasaan Spanyol diserahkan ke pihak Kolonial Belanda dan berubah nama menjadi Nieuw Guinea dan pada tahun 1956 menjadi Nederland Nieuw Guinea (Wally, 2018: 57).

Pada abad ke-16 Kesultanan Tidore juga menyatakan wilayah Papua di bawah kekuasaannya tepatnya tahun 1816. Tidore kemudian mengirimkan armada perdagangan dan tentara untuk monopoli di wilayah tersebut (Mealey, 1996:43). Selanjutnya Tidore mengirimkan armada-armada (*hongji*) pemungut pajak hasil bumi dari warga pesisir (Bachtiar, 1994: 49). Wilayah Papua diberi nama Papu Ua, yang artinya negeri dengan penduduk berkulit hitam, berambut kriting, yang belum mempunyai pemimpin atau raja. Ada pula yang menyebutnya "Papa Ia" yang artinya tidak bergabung dan tidak bersatu (wally, 2018).

4.1.2. Dari Kolonisasi hingga Dekolonisasi

Klaim Belanda atas wilayah Papua (Irian Barat) sebagai daerah koloni dimulai sejak tahun 1823. Secara *de facto* kekuasaan Belanda ditandai dengan pendirian benteng *Fort Du Bus* pada 24 Agustus 1828. Namun akibat serangan penyakit tropis dan beberapa kali serangan penduduk setempat membuat Belanda meninggalkan Papua pada tahun 1836 (Materay, 2012: 7). Saat wilayah Tidore mengakui kekuasaan kerajaan Belanda tahun 1872, dua puluh enam tahun kemudian tepatnya tahun 1898 Belanda kembali lagi ke Papua. Saat itu menurut Baidjo (2013:31), Papua dibagi oleh Para penjajah, Belanda menempati Papua bagian barat, Jerman bagian utara Papua bagian timur dan Inggris bagian selatan Papua timur. Sejak itu Papua bagian barat dikenal sebagai *Nuigini Belanda* atau *Nederlands New Guinea* (*Dustch New Guinea*) dan merupakan bagian dari Hindia Belanda.

Akhir kekuasaan Belanda setelah tentara Jepang menguasai Indonesia pada tahun 1942. Kehadiran Jepang tidak bertahan lama, di tengah janji Jepang akan memberikan

kemerdekaan kepada Indonesia yang disampaikan langsung oleh Marsekal Terauchi kepada Soekarno, Moh. Hatta, dan Radjiman Wediodiningrat ternyata Jepang lebih dulu jatuh di tangan sekutu. Hiroshima dijatuhi bom atom pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Jepang menyerah, semua wilayah jajahannya harus ditinggalkan termasuk Hindia Belanda.

Keadaan tersebut di atas membuat pihak Indonesia tidak berharap banyak atas kemerdekaan dari Jepang. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang merupakan bentukan Jepang diharap dapat melakukan langkah-langkah kongrit lewat Soekarno, ternyata banyak mendapat tantangan dari para pemuda yang berkeinginan untuk segera merebut kemerdekaan tanpa syarat. Melalui usaha perjuangan yang tidak mudah dengan situasi saat itu Soekarno dan Mohammd Hatta akhirnya memproklamasikan Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat pada tanggal 17 Agustus 1945 tepatnya pukul 10.00 WIB di Pegansaan Timur 56 Jakarta (sekarang Jalan proklamasi). Pada tanggal 23 Agustus 1945, enam hari setelah proklamasi kemerdekaan, Soekarno mendeklarasikan kesatuan Indonesia “dari Sabang Sampai Merauke”.

Pasca proklamasi pengambilalihan beberapa objek vital yang masih berada kekuasaan Jepang disaat itu pula sekutu AFNEI (Allied Force Netherlands East Indies) datang untuk melucuti kekuasaan tentara Jepang sebagai posisi penengah di bawah komando Letnan Jenderal Sir Philip Christison yang semula tugas utamanya adalah tugas-tugas kemeliteran dialihkan ke tugas-tugas administratif (Baidjo, 2013:33). Kehadiran sekutu di Indonesia dalam rangka tugas tersebut ternyata Belanda berkeinginan membangkitkan semangat kolonialisme, yakni NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) berada dibelakang keinginan kolonial tersebut. Kondisi ini membuat ketegangan dan penolakan keberadaan sekutu. Aksi meliter tidak dapat dielakkan. Pertempuran hebat diberbagai tempat, di Surabaya, Ambarawa, Sumatra Utara, padang, Bandung, dan beberapa daerah lainnya.

Pada 15 - 25 Juli 1946 berlangsung Konferensi Malino atas prakarsa Hubertus Johannes Van Mook dengan agenda pembentukan Negara-Negara di wilayah Indoensia sebagai bagian negara federal (Abdullah,2012), termasuk pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indoensia bagian timur. Tindak lanjut konferensi Malino dilanjutkan dengan konferensi Denpasar pada 18- 24 Desember 1946 dengan terwujudnya Negara Indonesia Timur. Tidak termasuk Irian Barat di dalamnya. Kejadian ini membuat Indoensia protes dan berhasil diredam oleh Van Mook dengan bujukan bahwa Irian Barat akan menjadi wilayah Indonesia Timur yang akan diatur kemudian. Menurut Van Mook, Belanda tidak menginginkan Irian Barat terpisah dari wilayah Indonesia. Apa yang disampaikan oleh wakil Belanda tersebut ternyata kemudian tidak sejalan dengan kebijakan Parlemen Belanda, dan semakin jelas siasat Belanda untuk memisahkan Irian Barat dari Indonesia dengan memasukkan dalam organisasi *South Pasific Commission* yang berkantor pusat di Noumea (Samoa) pada 6 Februari 1947 (Djamhari dkk, 2000: 5).

Pemerintah Indonesia berusaha menempuh jalan diplomasi, melalui perundingan ke perundingan. Perjanjian Renville (1948) dan Perjanjian Roem-Roijem (1949) tidak membahas status Papua, maka pada Konferensi Meja Bundar yang berlangsung di Den Haag Belanda tanggal 23 Agustus 1949 Indonesia berusaha terus mendesak Belanda. Dalam perjanjian itu disepakati bahwa seluruh bekas jajahan Belanda adalah wilayah Republik Indonesia, kecuali Papua Barat akan dikembalikan Belanda ke pangkuan NKRI setelah 2 (dua) tahun kemudian.

Kesepakatan yang dituangkan dalam Konferensi Meja Bundar pada kenyataannya diingkari oleh Belanda sendiri. Belanda tidak hanya sekedar bertahan di Papua, tetapi lebih dari itu, mempersiapkan langkah-langkah untuk memisahkan Tanah Papua dari NKRI. Dewan nasional Papua dibentuk oleh Belanda (cikal bakal Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan dimerdekakan secara tergesa-gesa lalu dilanjutkan pendeklarasian negara

boneka buatan Belanda ini pada tanggal 1 Desember 1961. Taktik Belanda membentuk negara boneka di Papua itu, membuat pihak Indonesia berang. Maka pada tanggal 19 Desember 1961 dari Alun-alun Utara Jogjakarta, Presiden Indonesia Soekarno mengumumkan Trikora (Tri Komando Rakyat) untuk mengembalikan Irian Barat kepangkuan Negara Republik Indonesia. Konfrontasi dengan Belanda pun tak terhindarkan.

Periode 1952-1962 dikenal dengan periode dekolonisasi. Pada periode ini Belanda melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Anggaran pemerintah Belanda untuk Papua meningkat lima kali lipat antara tahun 1950 sampai 1961 (McGibbon, 2004:11). Belanda mencoba menarik simpati warga dengan memberi perhatian pada layanan publik dan kesejahteraan orang Papua. Perubahan kebijakan politik Belanda ini ditempuh untuk memperbaiki citra mereka di mata orang Papua. Bagi pemerintah Belanda, kebijakan ini jauh lebih penting daripada berperang dengan Indonesia. *Amtenaar* Belanda, misionaris dan penjelajah alam mulai berdatangan untuk melakukan perubahan-perubahan diberbagai bidang. Jumlah orang-orang Belanda yang tinggal di Papua pun meningkat dua kali lipat, dari 8500 orang pada tahun 1950 (Garnaut dan Manning, 1979:13), menjadi 15000 orang pada tahun 1961 (Osborne, 1985:19).

Periode dekolonisasi membawa orang Papua dalam proses perubahan dan pembentukan identitas baru. Para misionaris, pegawai kolonial, penjelajah hutan dan kaum naturalis yang tekun dan fanatik, mulai menjelajah dari wilayah dataran rendah sampai daerah pegunungan yang terjal. Dengan berbagai cara mereka berusaha mendekati orang Papua (Mealey, 1996:47). Mereka juga memperkenalkan bahasa Melayu dan ide-ide barat kepada orang Papua (Meteray, 2012: 31). Pemerintah kolonial menerapkan aturan-aturan untuk menjaga ketertiban sosial dan memungkinkan berlangsungnya penjelajahan. (Akhmad, 2016).

Pemerintah Belanda menempatkan orang-orang kulit putih pada lapisan atas pemerintahan. Lapisan menengah ditempati orang Indonesia dari luar Papua, seperti Ambon, Key,

dan Manado yang berperan guru dan karyawan perusahaan. Lapisan bawah adalah Orang Asli Papua. Diskriminasi tersebut tentu menimbulkan rasa rendah diri dan tertekan bagi warga asli. Akan tetapi hal itu juga memunculkan inspirasi gerakan kultus barang lkan (*cargo cult*) di Papua. *Cargo cult* merupakan suatu jawaban masyarakat suku di Papua untuk mengobati trauma yang diakibatkan oleh kontak mereka dengan orang-orang Eropa (Strelan. G, dan Jan A Godschalk. 1989). Gejala seperti ini juga bagian dari cara mengobati rasa tertekan dan rendah diri ketika mereka membandingkan identitas mereka dengan para pendatang (Akhmad, 2016).

Demi mempertahankan kekuasaanya di Papua, Belanda kemudian mengeluarkan kebijakan yang memberi perhatian pada pendidikan bagi anak-anak Papua, khususnya anak-anak kepala suku. Mereka dikirim ke OSIBA atau Sekolah Pamong Praja Papua dan setelah itu mereka ditempatkan menjadi *bestir*. Bahkan ada di antara orang Papua yang memiliki pengalaman menjadi asisten yang diperbantukan HPB (*Hoofd Plaaststelijk*). Kebijakan menempatkan orang Papua pada posisi penting di pemerintahan tersebut tidak lain untuk menentang klaim Indonesia atas wilayah Papua (McGibbon, 2004: 11).

Melalui upaya diplomasi yang alot yang difasilitasi Perserikatan Bangsa-bangsa, Belanda akhirnya mau menandatangani *New York Agreement* bersama Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1962. Indonesia diwakili oleh Soebandrio, dan Belanda diwakili oleh Jan Herman van Roijen dan C.W.A. Schurmann (Wihardyantie dkk, 2018). Isi kesepakatan itu intinya memuat *road map* penyelesaian sengketa atas wilayah Papua/Irian Barat. Perserikatan Bangsa-bangsa kemudian membawa Persetujuan bilateral *New York Agreement* ini ke dalam forum sidang Perserikatan Bangsa-bangsa, yang kemudian diterima dan dikukuhkan menjadi Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa Nomor 1752 yang mulai berlaku 21 September 1962. Agar pihak Belanda tidak merasa dipermalukan dan

kehilangan muka di forum internasional tersebut, penyerahan kekuasaan dari Belanda atas Irian Barat (Papua) dilakukan secara tidak langsung. Pihak Belanda menyerahkannya kepada Perserikatan Bangsa-bangsa, baru setelah itu pihak Perserikatan Bangsa-bangsa menyerahkannya ke pemerintah Indonesia melalui referendum (PEPERA) (Pamungkas, 2015).

Referendum atau PEPERA secara resmi dimenangkan pihak Indonesia. Akan tetapi pelaksanaan Pepera ini pula yang banyak menuai protes oleh sebagian masyarakat dan elit-elit Papua. Semakin tahun semakin banyak orang Papua yang menggugat keabsahan Pepera. Bahkan ada yang menganggap pelaksanaan Pepera di bawah tekanan militer (Meteray, 2012; Kartikasari dkk, 2012, Pogau, 2012). Legitimasi Pepera yang diragukan itu telah merong-rong legitimasi Indonesia atas Papua.

Pada 1 Oktober 1962, wakil gubernur jenderal Belanda H. Veldkamp menyerahkan kekuasaannya atas Irian Barat kepada sebuah badan Perserikatan Bangsa Bangsa yang khusus dibentuk untuk masalah Papua. Badan itu bernama UNTEA (*United Nations Temporary Executive Authority*). Pada acara penyerahan itu, H. Veldkamp mengatakan :

“Mulai saat ini, akibat persetujuan Indonesia akibat persetujuan Internasional yang berhubungan dengan itu, maka tanah dan bangsa Nieuw Guenea Barat telah ditempatkan di bawah pemerintahan yang baru : Penguasa sementara perserikatan bangsa-bangsa. Kedaulatan Netherlands atas tanah ini telah berakhir. Tibalah suatu jangka waktu yang baru, jangka mana berlangsung sampai pada saat pertanggungjawab atas pemerintahan diserahkan kepada Indonesia sepenuhnya.” (Sihombing, 2005:32).

UNTEA lalu mempersiapkan referendum. Pada tanggal 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan pemerintahan Papua bagian barat kepada Indonesia. Hollandia yang tadinya menjadi pusat kekuasaan kerajaan Belanda di Papua, diubah namanya menjadi Kota Baru (Jayapura).

4.1.3. Era Integrasi

Pengintegrasian wilayah Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia penuh dengan sejarah panjang sejak tahun 1940-an sampai dengan tahun 1960-an menguras energi, banyak jiwa yang melayang baik dari pihak Belanda maupun Indonesia. Strategi diplomasi, ekonomi dan politik dilancarkan oleh Indonesia untuk merebut Papua dari keinginan Belanda mempertahankan sebagai negara boneka ditentang oleh Sukarno dengan memaklumkan Trikora. Dari alun-alun Utara Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1961 menginstruksikan kepada Mayor jenderal Soeharto sebagai Panglima Komando Operasi Militer Trikora yang bermarkas di Makassar dengan melakukan penerjunan tentara sukarelawan (Wally, 2018: 78). Sampai Papua dikuasai kembali oleh Indonesia pada tahun 1 Mei 1963 dan dengan lewat jajak pendapat penentuan pendapat rakyat (PEPERA) 1969.

Momentum 1 Mei ini hingga kini diperingati sebagai Hari kembalinya Papua ke dalam NKRI. Tiga hari kemudian, tepatnya 4 Mei 1963 Soekarno menjejakkan kakinya di Tanah Papua. Di hadapan ribuan orang Papua di Kota Baru (Jayapura), Soekarno dengan semangat berapi-api berorasi menyampaikan pidato:

“Irian Barat sejak 17 Agustus 1945 sudah masuk dalam wilayah Republik Indonesia. Orang kadang-kadang berkata, memasukan Irian Barat ke dalam wilayah Ibu Pertiwi. Salah! Tidak! Irian Barat sejak daripada dulu sudah masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia...” (Subandrio, 2001: 14)

Perjuangan merebut Irian Barat menunjukkan konsistensi Indonesia untuk mempertahankan wilayah kedaulatannya dengan keterlibatan segenap para pejabat sipil dan militer. Untuk mengenang perjuangan tersebut Presiden Soekarno membangun Patung pembebasan Irian Barat di lapangan Banteng Jakarta (Saksono, 1992). Oleh karena letaknya di jalan lapangan Banteng maka patung tersebut dikenal dengan Patung Lapangan Banteng. Pengakuan dunia internasional atas kedaulatan Indonesia di

Papua beriringan dengan penggantian nama nama Irian diganti menjadi Irian Barat sejak 1 Mei 1963.

Kemudian pada tanggal 1 Maret 1973 sesuai dengan peraturan Nomor 5 tahun 1973 nama Irian Barat resmi diganti oleh Presiden Soeharto menjadi nama Irian Jaya (Kurniawan, 2016). Peralihan penuh Papua dari tangan Belanda ke Republik Indonesia, terjadi pula perubahan orientasi kebijakan, dari pembangunan ekonomi rakyat pribumi ke pembangunan ekonomi migran sebagaimana di kemukakan Aditjondro dalam (Akhmad, 2005). Pemerintah pusat dan provinsi melakukan kebijakan pembangunan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara membuka kawasan-kawasan yang potensial di seluruh Papua. Wilayah tersebut makin terbuka untuk kedatangan orang luar. Kota-kota seperti Jayapura, Sorong, Timika, Merauke, Biak dan Nabire dan lainnya segera dipenuhi pendatang dengan profesi beragam. Ada Pegawai Negeri Sipil, Tentara, Polisi, pedagang, dan lain-lain. Sebagian besar para migran tersebut adalah mereka yang dari suku Bugis-Makassar dan Jawa-Madura yang identik dengan etnis muslim. Komunitas-komunitas Bugis-Makassar dengan mudah dapat ditemui di pasar-pasar dan sentra-sentra bisnis.

Oleh karena penduduk asli masih berorientasi pada kultur berburu dan meramau, maka sektor ekonomi seperti perdagangan dan jasa, termasuk pertanian, banyak dimasuki dan dikuasai oleh para migran tersebut. Akibatnya, penduduk asli seperti hidup dalam dunia mereka yang telah diubah oleh para pendatang. Budaya berburu dan meramau tidak lagi *compatible* dengan dunia yang sudah berubah itu. Kalau dahulu mereka tidak memerlukan uang tunai karena segala sesuatu diambil langsung dari alam, maka sekarang uang menjadi penting karena segala sesuatu harus dibeli. Selain itu bermunculan kebutuhan yang memang tidak bisa diambil dari alam, seperti kebutuhan bahan bakar, biaya pendidikan, listrik, telekomunikasi, dll yang semua harus dibeli dengan uang. Budaya berburu dan meramau tidak memiliki tradisi berdagang dan menjadi pegawai, maka mereka tidak

mampu bersaing dengan migran. Terjadilah kesenjangan sosial dan ekonomi antara penduduk asli dan migran.

4.1.4. Era Otonomi Khusus Papua

Berakhirnya rezim Orde Baru yang ditandai berhentinya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, telah melahirkan dinamika baru bagi konstalasi politik tanah air dari Sabang sampai Merauke. Komponen masyarakat Papua merespon moment tersebut dengan menyampaikan aspirasi secara terbuka atas ketidakpuasan, rasa ketidakadilan, ketimpangan ekonomi serta pelanggaran HAM sejak bersama dengan Republik Indonesia. Melalui “Tim 100”, tokoh-tokoh elit Papua diterima oleh Presiden B.J. Habibie pada tanggal 26 Februari 1999. Salah satu point penting dari pertemuan tersebut adalah permintaan secara terbuka untuk memisahkan diri dari bagian Republik Indonesia (Maniagasi, 2001:33).

Respon balik pemerintah terhadap tuntutan tersebut disikapi dengan melakukan langkah-langkah kongkrit. Dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan negara hadir di tengah rakyat dibentuk dua Provinsi tambahan dari yang ada oleh Presiden B.J. Habibie yaitu Provinsi Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat yang sepekan kemudian Gubernurnya diangkat melalui Dekrit Presiden No. 327/1999. Namun besarnya arus demonstrasi penolakan terhadap pembentukan Provinsi tersebut akhirnya tanggal 16 Oktober 1999 DPRD Irian Jaya menolak keputusan tersebut (Muryantini, 2016). Undang-Undang dan Dekrit tersebut dibatalkan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid.

Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid muncul aspirasi untuk mengembalikan nama Papua dari nama Irian Jaya. Atas pertimbangan kultural dan akomodasi terhadap keinginan masyarakat Papua, akhirnya permintaan tersebut dapat disetujui oleh Pemerintah Pusat pada tanggal 1 Januari 2000. Presiden sendiri saat berkunjung ke Papua menyampaikan

bahwa nama Provinsi Irian Jaya diubah menjadi Provinsi Papua. Pada Mei 2000 nama Papua secara resmi dipertegas dalam Kongres Rakyat Papua sebagai bentuk kebanggaan identitas kepapuaan (Maniagasi, 2001: 34).

Serangkaian dinamika politik Papua pasca Orde Baru di tingkat lokal yang semakin panas membuat pemerintah pusat dan Pemerintah daerah berinisiatif untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan integritas kedaulatan NKRI di Papua dengan mendorong model pemerintahan dengan status Otonomi Khusus bagi Papua. Konsep otonomi khusus dianggap sebagai tawaran yang paling realistis saat itu untuk mengakhiri perdebatan antara pihak pemerintah pusat dan masyarakat Papua. Melalui berbagai forum kajian dan proses perdebatan yang intens termasuk mengakomodir draf akademik yang diserahkan ke pusat, akhirnya pada tanggal 20 Oktober 2001 DPR-RI menetapkan Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang. Presiden Megawati saat itu pada tanggal 21 November 2001 menandatangani Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Solossa, 2006). Otonomi khusus Papua diartikan sebagai kebebasan bagi rakyat untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya dengan mendapatkan kewenangan yang lebih besar, mengatur dan mengelola dan mengatur segenap sumber daya yang dimiliki dengan tidak meninggalkan tanggung jawab untuk memberikan kontribusinya kepada kepentingan nasional. (Nasution, 2010: 45-46).

Era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mencoba menindaklanjuti kekhususan Papua dengan langkah-langkah kongkrit sebagaimana amanat otonomi khusus. Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural Orang Asli Papua pun disahkan oleh Presiden pada tanggal 23 Desember 2004 dengan sejumlah kewenangan khusus yang ada pada lembaga tersebut yang dibagi dalam tiga bagian, adat, perempuan dan agama. Lembaga ini yang mengawal berbagai pelaksanaan kebijakan di

Papua agar mengarah kepada keberpihakan dan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak dasar Orang Asli Papua.

Perjalanan Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Papua tahun 2001 sampai saat ini tentu terdapat banyak kekurangan, banyak yang menilai belum optimal, bahkan ada yang menilai gagal dalam mesejahterakan rakyat Papua. Meski demikian, Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan bahwa “Otsus Papua tidak gagal” (Enembe, 2016: 62). Baginya bagaimanapun Papua telah mampu menjalankan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Meski demikian Enembe menilai situasi saat ini jauh berbeda dengan saat dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Tahun 2001 silam. Pada saat itu hanya satu provinsi di Papua, sedangkan sejak tahun 2007 Papua telah berkembang menjadi dua provinsi dengan dibentuknya Propinsi Papua barat. Implikasinya adalah banyak kebutuhan masyarakat Papua terus berkembang. Hal itu menurutnya mengharuskan adanya revisi terhadap undang-undang Otonomi Khusus tersebut.

Dengan gagasan tersebut di atas, Gubernur Papua Lukas Enembe, pada tanggal 29 April 2013 menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden menyetujui wacana revisi tersebut dengan mencari point-point yang belum ada untuk ditambahkan dalam perubahan termasuk memberikan bobot kewenangan yang lebih luas yang bersifat khusus bagi Papua. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengistilahkan Otonomi Khusus Plus (Otsus plus). Sejak itu draf revisi disiapkan untuk dibahas oleh pemerintah dan DPR. Akan tetapi pembahasan draf revisi tidak dapat berlanjut karena berakhirnya masa keanggotaan legislatif tahun 2009-2014. Usaha untuk memasukkan agenda perubahan undang-undang Otsus dalam Prolegnas Prioritas di periode selanjutnya juga menemui kegagalan.

Status Otonomi Khusus lahir melalui proses tarik ulur kepentingan yang kompleks. Oleh karena berawal dari tawaran (*bargaining*) masyarakat Papua kepada Pemerintah Pusat maka Otonomi Khusus membuka ruang manuver orang asli untuk menegaskan identitas mereka. Di sisi lain otonomi khusus dan

pemekaran provinsi dan kabupaten/kota ternyata membawa Papua pada masalah integrasi politik yang lebih rumit. Sampai pada tahun 1996 di Papua hanya ada 13 Kabupaten. Pada tahun 2008, jumlah daerah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat telah mencapai 36 kabupaten. Sembilan kabupaten di Propinsi Papua Barat dan 27 di Propinsi Papua dan kedua Provinsi tersebut terus melakukan pemekaran. Pemekaran tersebut bukan cuma di tingkat kabupaten, tetapi juga di tingkat distrik, dan kampung. Sampai hari ini wacana pemekaran di Papua masih berlanjut.

Gambar : 4.1
Peta Provinsi Papua



Sumber : demokrasiindonesia.blogspot.com

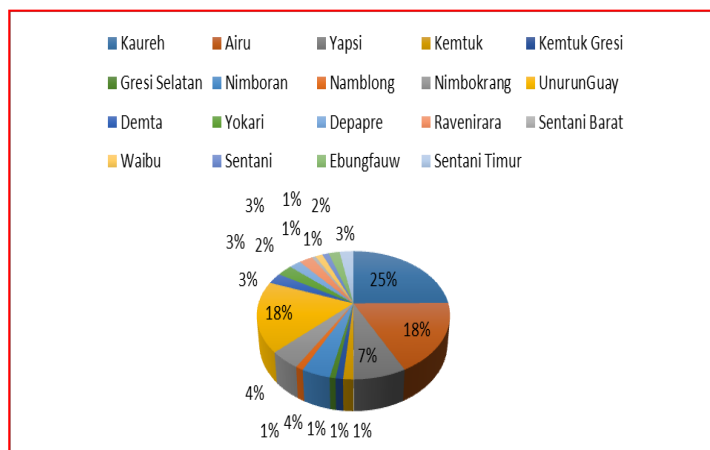
4.2. Mengenal Kabupaten Jayapura

4.2.1. Letak Geografis, Topografi dan Demografi

Kabupaten Jayapura merupakan kabupaten yang hanya berjarak kurang lebih 33 kilometer dari ibu kota Provinsi Papua dengan ibukota Sentani. Kabupaten Jayapura adalah daerah yang penyanggah sebagian kebutuhan Kota Jayapura disamping kabupaten terdekat lainnya seperti Kabupaten Keerom. Secara geografis, Kabupaten Jayapura luasnya saat ini adalah 17.516.6 Km² yang terbagi dalam 19 Distrik 139 Kampung dan 5 Kelurahan sebagaimana telah disebutkan terletak diantara 139⁰-140⁰ Bujur Timur dan 2⁰ -

3⁰ Lintang Utara. Distrik Kaureh dengan luas Wilayah 4.537,9 Km² merupakan distrik terluas di Kabupaten Jayapura atau sekitar 24,88 % dari keseluruhan luas Kabupaten Jayapura dan distrik Sentani Barat merupakan distrik yang luasnya terkecil dengan luas wilayah 129,2 Km² atau sekitar 0,74 % dari luas wilayah Kabupaten Jayapura sebagaimana pada gambar di bawah ini.

Gambar: 4.2
Luas Wilayah Kabupaten Jayapura Menurut Distrik



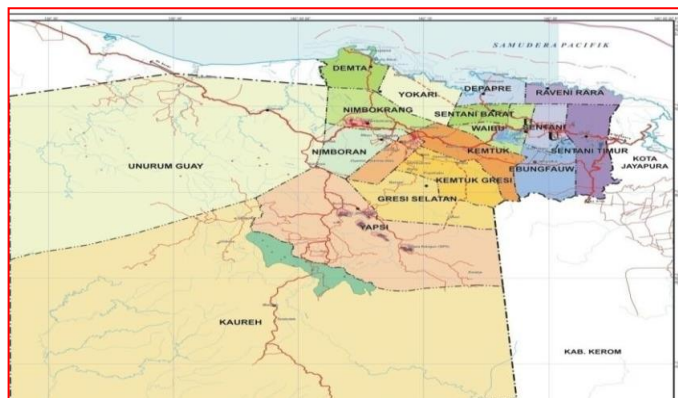
Sumber : Pemerintah Kabupaten Jayapura, tahun 2017

Sedangkan batas-batas wilayah Kabupaten Jayapura adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara Samudera Pasifik dan Kabupaten Sarmi.
- Sebelah Selatan Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Tolikara.
- Sebelah Timur dengan Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom.
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Sarmi.

Kabupaten Jayapura dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat. Penetapan Kabupaten Jayapura sebagai daerah tingkat II bersamaan dengan 8 (delapan) Kabupaten Otonom lainnya, yakni Biak Numfor, Manokwari, Sorong, Fak-Fak Merauke, Jayawijaya, Paniai dan Yapen Waropen. Selanjutnya Kabupaten Jayapura dibentuk enam wilayah pemerintahan yang meliputi wilayah Pemerintahan setempat Jayapura, Nimboran, Membramo, Keerom, Sarmi, dan Dafonsoro dengan pusat pemerintahan daerah berkedudukan di Jayapura (Saat ini Kota Jayapura).

Gambar 4.3 :
Peta Kabupaten Jayapura



Sumber: Perda Nomor 21 Tahun 2009 Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2008-2028 Kabupaten Jayapura.

Seiring dengan perkembangan daerah Papua, maka pada tahun 1993 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1993, wilayah Kabupaten Jayapura dimekarkan menjadi dua yaitu Kabupaten Jayapura (Kabupaten Induk) dan Kotamadya Jayapura. Ibukota Kabupaten Jayapura kemudian dipindahkan ke Sentani berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2000. Terlepas dari berbagai pertimbangan namun dipilihnya

Sentani sebagai ibu kota Kabupaten Jayapura didasarkan pada tujuan peningkatan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Tanggal 10 Maret 2010 merupakan tonggak awal sejarah kota Sentani ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Jayapura yang diperingati setiap tahun oleh masyarakat Kabupaten Jayapura hari jadi Kota Sentani.

Perpindahan ibu kota Kabupaten Jayapura ke Sentani sudah barang tentu mengharuskan berbagai fasilitas perkantoran untuk dapat menjalankan berbagai aktifitas pelayanan pemerintahan. Bertepatan dengan pelantikan Bupati Jayapura Habel Melkias Suwae dan Wakil Bupati Tunggul Simbolon periode 2001-2006 pada tanggal 12 Oktober 2001, Kabupaten Jayapura telah memiliki kawasan perkantoran terpadu dalam satu kompleks yang diresmikan penggunaannya oleh Gubernur provinsi Papua Yaap Salossa. disamping kantor-kantor pemerintah lainnya seperti kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura, kantor Badan Pertanahan, kantor Pengadilan Agama, kantor-kantor satuan di bawah POLDA seperti POLRES, POLSEK serta kantor-kantor angkatan satuan dibawah KODAM seperti Batalyon 751 Raider serta LANUD Jayapura yang telah ada lebih dulu, demikian pula terdapat kantor-kantor cabang perbankan baik, bank pemerintah maupun swasta dan kantor dunia usaha lainnya dalam rangka ikut serta membangun Kabupaten Jayapura untuk lebih maju, dan lebih lengkap lagi dalam hal fasilitas pelayanan publik.

Pemisahan secara administratif dari Kota Jayapura dan perkembangan wilayah yang mengharuskan pihak pemerintah daerah Kabupaten Jayapura mendekati pelayanan kepada masyarakat, dibutuhkan pemekaran pemerintahan pada tingkat distrik. Tahun 2003 dilakukan pemekaran distrik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 12 Tahun 2003 tentang pembentukan distrik Ebungfauw, distrik Waibu, distrik Namblong, distrik Yapsi dan distrik Airu. Selanjutnya pada tahun 2005 kembali dilakukan pemekaran distrik berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan distrik Raveni Rara, distrik Gresi Selatan dan distrik Yokari. Sehingga secara administratif, wilayah Kabupaten Jayapura bertambah dari 16 Distrik menjadi 19 Distrik.

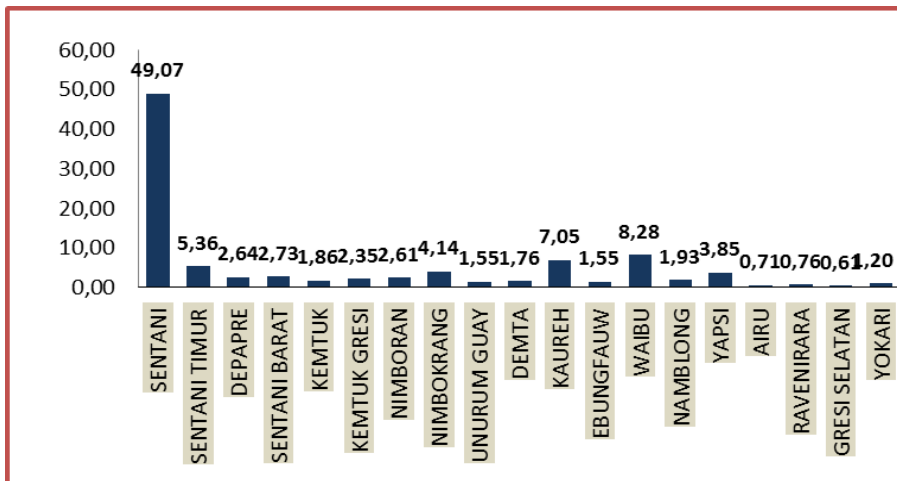
Pemekaran distrik tersebut diiringi dengan pemekaran kampung, yang tujuannya tentu untuk kepentingan dekatnya layanan dan rontan kendali pemerintah kepada masyarakat. Tahun 2007 dilakukan pemekaran kampung tersebut sehingga jumlah kampung yang sebelumnya berjumlah 127 Kampung menjadi 137 Kampung melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kampung Benggwin Progo, Kampung Aib, Kampung Hyansip, Kampung Sumbe, Kampung Hanggaiy Hamong, Kampung Nandali, Kampung Bundru, Kampung Doromena, Kampung Bambar dan Kampung Yahim. Pada tahun 2009, kembali dilakukan pemekaran kampung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 13 Tahun 2009 tentang pembentukan Kampung Kamikaro dan Kampung Naira. Sehingga Kabupaten Jayapura saat ini terdiri dari 19 (sembilan belas) distrik, 5 (lima) Kelurahan telah terbentuk 139 (seratus tiga puluh sembilan) Kampung.

Sementara keadaan topografi Kabupaten Jayapura memiliki dari dataran rendah, dataran tinggi, daerah perbukitan serta pegunungan dan lereng umumnya relatif terjal dengan kemiringan 5%-30% serta mempunyai ketinggian aktual 0,5 mdpl- 1500 mdpl dimana letak Kabupaten Jayapura yang persis berada pada kaki pegunungan Cycloops, sehingga wilayahnya lebih banyak dataran tingginya dibandingkan dataran rendah. Daerah pesisir pantai utara berupa dataran rendah yang bergelombang dengan kemiringan 0%-10% yang ditutupi dengan endapan alluvial. Secara fisik, selain daratan juga terdiri dari rawa (13.700 Ha). Sebagian besar wilayah Kabupaten Jayapura (72,09%) berada pada kemiringan diatas 41%, sedangkan yang mempunyai kemiringan 0-15% berkisar 23,74%.

Secara demografi, Jumlah penduduk Kabupaten Jayapura sebanyak 228.558 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki

sebanyak 123.831 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 104.727 jiwa dengan 62.198 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 19 Distrik dan 139 kampung serta 5 kelurahan. Penyebaran dan Perkembangan penduduk Kabupaten Jayapura terlihat lebih banyak di distrik Sentani sebagai ibukota dan pusat pemerintahan serta bertemu berbagai suku, etnis ras dan agama. Untuk dapat mengetahui tentang data presentase jumlah penduduk Kabupaten Jayapura berdasarkan pada wilayah Distrik maka dapat dilihat bagaimana kepadatan penduduk masing-masing yang dapat membedakan baik dari aspek suku, ras dan agama yang ada, dapat dilihat pada grafik sebagaimana pada grafik berikut.

Grafik : 4.1
Presentase Jumlah Penduduk
Kabupaten Jayapura Menurut Distrik

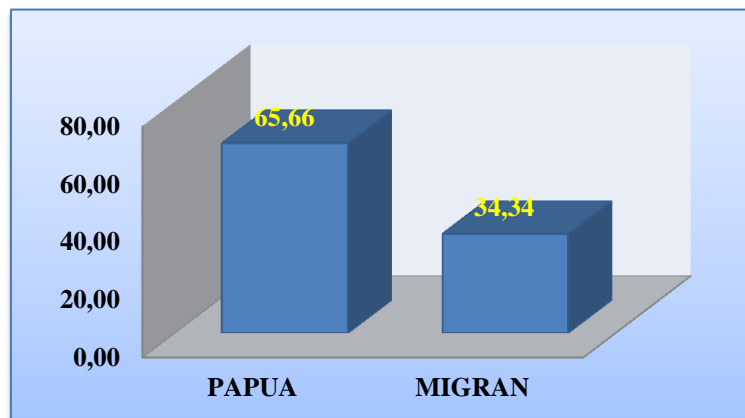


Sumber Data : Diolah dari data BPS Kabupaten Jayapura Tahun 2017

Penduduk Kabupaten Jayapura yang beragam dari latar belakang seperti yang telah dijelaskan, bila disederhanakan dapat diklasifikasikan menjadi suku penduduk Orang Asli Papua sebanyak 160.063 jiwa atau 65,66 % dari total penduduk, sedangkan penduduk migran sebanyak 78.495 jiwa atau 34 %.

Sebagaimana pada data yang terlihat pada presentase jumlah penduduk berdasarkan distrik. Maka distrik Sentani menjadi daerah yang melebihi jumlah distrik lain karena disamping sebagai ibukota kabupaten sebagaimana telah dijelaskan, juga karena bertemunya beragam macam suku, etnis ras dan agama. Keragaman ini yang dapat melahirkan banyak kompleksitas dalam suatu komunitas yang harus selalu dikelola dengan baik oleh berbagai pihak terutama pemerintah daerah dan segenap *stake holder* tentang arti dari suatu keragaman. Dapat sebagai potensi kemajuan daerah dan disisi lain dapat pula menjadi potensi konflik. Peta etnik di Kabupaten Jayapura bila disederhanakan menjadi etnik Papua dan migran dapat dilihat pada grafik berikut

Grafik . 4.2
Presentase Jumlah Penduduk Menurut Suku Bangsa
Kabupaten Jayapura



Sumber Data : Diolah dari data BPS Kabupaten Jayapura Tahun 2017

4.2.1. Pola Pemukiman Penduduk

Pola pemukiman masyarakat Kabupaten Jayapura yang heterogen dapat dikatakan tidak merata. Hal ini disebabkan oleh karena kontur wilayahnya yang lebih banyak perbukitan dan gunung-gunung, sehingga pusat pemukiman terpusat pada

daerah-daerah yang datar seperti distrik Sentani. Dalam perkembangan selanjutnya wilayah tersebut selain berisi pemukiman penduduk, juga banyak dibangun fasilitas umum dan perkantoran pemerintah dan swasta. Ada pula perkantoran-perkantoran yang dibangun di daerah perbukitan, misalkan Kantor Bupati di area Gunung Merah dan Rumah Sakit Umum Youwari, Doyo sebagaimana yang telah dipaparkan tersebut di atas mempengaruhi tempat pemukiman penduduk yang ada demikian pula pada wilayah-wilayah lainnya yang terkait dengan sarana dan prasarana.

Distrik Waibu memiliki daerah datar yang cukup luas, dan berbatasan dengan Distrik Sentani. Distrik ini dinilai memiliki prospek yang bagus untuk pemukiman di masa depan. Para pengembang perumahan telah melakukan pembangunan di distrik tersebut, baik perumahan bersubsidi maupun yang tidak bersubsidi, pembangunan pasar dan rumah tokoh, sehingga para migran baru juga mulai melirik dan bermukim di sekitar wilayah tersebut.

Sementara wilayah distrik lainnya yang ada di Kabupaten Jayapura, seperti distrik Nimbokrang, Yapsi, Dosai, Kentuk, dan Kentuk Gresi, tingkat kepadatan penduduknya masih kurang. Daerah-daerah tersebut dahulunya merupakan daerah transmigrasi sehingga lahannya lebih banyak digunakan untuk bercocok tanam. Para transmigran dari Jawa waktu itu memperoleh 1 1/4 Ha lahan (1Ha untuk lahan pertanian dan 1/4Ha untuk rumah tinggal. Dengan berkembangnya Kabupaten Jayapura, terutama pada distrik Sentani, maka prospek ke depan pembangunan telah mengarah ke daerah distrik lain di luar Sentani. Wilayah-wilayah cukup luas tersebut perlahan tapi pasti mulai dijadikan tempat pemukiman.

Sementara bagi penduduk Orang Asli Papua, pesebarannya dapat dikatakan tidak merata. Mereka mendiami kampung-kampung mereka yang ada di pinggiran danau Sentani dan di dataran rendah. Di pinggiran danau Sentani mereka berkumpul membentuk perkampungan dengan pola tertentu

seperti yang diungkapkan oleh Sanderson: terdapat dua ciri kekerabatan yang paling penting adalah : Aturan tempat tinggal (*recidence*), dan aturan keturunan (*descent*). Terdapat aturan tempat tinggal dengan siapa, menetapkan kelompok lokal, kelompok anggota kerabat yang bekerjasama dalam melakukan kegiatan rumah tangga (Stephen, 2000 : 428).

Namun dari sebagian dari mereka penduduk asli Kabupaten Jayapura ada pula yang telah berbaur dengan para migran. Mereka mendiami perumahan-perumahan seperti KPR BTN. Ada juga penduduk asli membangun rumah sendiri di tanah adat yang dimilikinya, yang tanah tersebut bersebelahan dengan tanah yang telah dijual kepada para migran. Dengan demikian muncul kehidupan bertetangga antara orang asli dengan para migran yang berasal dari luar Kabupaten Jayapura.

4.3. Kondisi Kehidupan Sosial-budaya, Politik, Ekonomi Kabupaten Jayapura

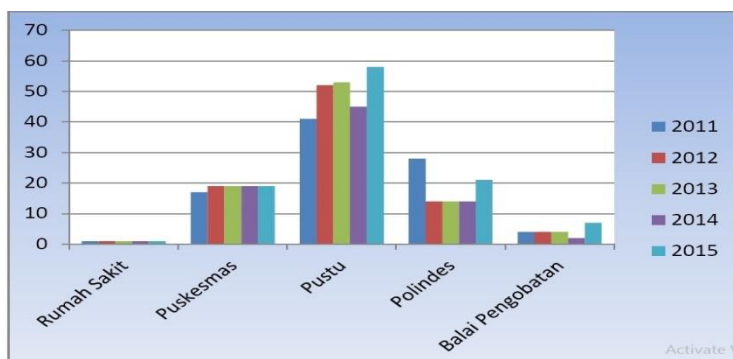
4.3.1. Sosial-budaya

4.3.1.1. Kesehatan

Faktor pelayanan kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu daerah yang digambarkan dengan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan termasuk tenaga medis dan paramedis pada seluruh sarana kesehatan dasar. Terdapat 1 unit Rumah Sakit Umum Daerah, 19 Puskesmas yang tersebar di 19 Distrik serta 58 Puskesmas Pembantu yang ada di kampung-kampung. Dalam hal ketersediaan Puskesmas Pembantu terjadi peningkatan sebanyak 5 unit dari tahun sebelumnya.

Dari segi tenaga kesehatan yang tersebar di Kabupaten Jayapura, terdapat tenaga Dokter Umum sebanyak 51 orang, tenaga perawat sebanyak 307 orang dan tenaga Bidan sebanyak 95 orang. Tenaga jasa kesehatan ini lebih banyak di kalangan migran yang mendominasi karena faktor sumber daya manusia dari kalangan Asli Papua.

Grafik. 4.3
Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten
Jayapura



Sumber Data : Diolah dari data BPS Kabupaten Jayapura Tahun 2017

Demikian pula indikator derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah dilihat dari tingginya umur harapan hidup seseorang, angka kematian bayi dan angka kematian ibu maternal serta menurunnya angka prevalensi gizi kurang pada anak balita. Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Jayapura yang diperoleh dari data statistik terakhir pada tahun 2014 mencapai 67,74 tahun, sementara angka kematian bayi sebesar 8/1000 KLH, angka kematian ibu 73/100.000 KLH dan prevalensi gizi kurang pada anak balita 2,0% pada tahun 2015. Dengan demikian kontribusi bidang kesehatan terhadap peningkatan IPM sangat dipengaruhi oleh Angka Harapan Hidup (AHH), yang sangat erat kaitannya dengan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka kematian Balita (AKABA) dan Angka Kematian ibu (AKI).

Tabel. 4.1
Angka Harapan Hidup Kabupaten Jayapura

Kabupaten	Angka Harapan Hidup				
	2013	2014	2015	2016	2017
Merauke	66,48	66,49	66,5	66,53	66,56
Jayawijaya	57,71	57,79	58,29	58,48	58,67
Jayapura	66,01	66,02	66,32	66,4	66,47
Nabire	67,23	67,24	67,44	67,5	67,55
Kepulauan Yapen	68,63	68,63	68,67	68,69	68,71
Biak Numfor	67,84	67,85	67,86	67,86	67,87
Paniai	65,13	65,15	65,45	65,58	65,7
Puncak Jaya	63,74	63,77	64,17	64,29	64,41
Mimika	71,85	71,87	71,89	71,9	71,93
Boven Digoel	57,6	57,64	58,24	58,51	58,77
Mappi	63,51	63,52	64,02	64,16	64,3
Asmat	54,91	55	55,5	55,9	56,32
Yahukimo	64,54	64,56	65,06	65,19	65,32
Pegunungan Bintang	63,56	63,58	63,78	63,84	63,9
Tolikara	64,64	64,66	64,86	64,98	65,1
Sarmi	65,46	65,49	65,69	65,76	65,82
Keerom	65,97	65,99	66,09	66,13	66,18
Waropen	65,71	65,72	65,73	65,77	65,82
Supiori	65,15	65,15	65,25	65,29	65,33
Mamberamo Raya	56,37	56,37	56,57	56,74	56,9
Nduga	53,54	53,6	53,6	54,5	54,6
Lanny Jaya	64,82	64,85	64,86	65,63	65,65

Mamberamo Tengah	62,59	62,62	62,72	62,82	62,92
Yalimo	64,83	64,85	64,86	64,9	64,94
Puncak	64,98	64,98	65,08	65,1	65,13
Dogiyai	64,34	64,36	64,86	64,99	65,12
Intan Jaya	64,87	64,88	64,98	65,04	65,09
Deiyai	64,25	64,27	64,47	64,55	64,63
Kota Jayapura	69,95	69,95	69,97	69,99	70
Provinsi Papua	64,76	64,84	65,09	65,12	65,14

Sumber : BPS Papua, 2017

Meskipun angka harapan hidup tersebut di atas masih di bawah standar menurut MDGs (*Millenium Development Goals*) sebesar 70,6 tahun, namun dari angka pada tabel tersebut di atas masyarakat Kabupaten Jayapura mengalami peningkatan angka harapan hidup yang terus meningkat dari tahun-tahun.

4.3.1.2. Pendidikan

Betapa pentingnya sarana dan prasarana yang ada dalam suatu wilayah, begitu pula halnya dengan Kabupaten Jayapura yang selalu berbenah setiap tahunnya untuk dapat melengkapi sarana umum yang ada. Sarana umum yang tersedia yang difasilitasi oleh pemerintah dalam hal ini dinas yang membawahi urusan pendidikan yaitu dinas pendidikan itu sendiri. Sebagai urusan wajib Pemerintah dalam pelayanan kebutuhan dasar masyarakat telah menfalistasi sarana pendidikan mulai dari TK/PAUD, SD/MI dan sederajat, SLTP/MTs dan sederajat, SLTA/SMK dan sederajatnya baik negeri maupun swasta, Universitas swasta, Sekolah Tinggi Negeri maupun Swasta, tersebar di Kabupaten Jayapura.

Kondisi pendidikan di Kabupaten Jayapura dapat digambarkan melalui ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang tersebar di 19 distrik terutama dalam mendorong peningkatan program Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun

dan Pendidikan Menengah. Jumlah prasarana pendidikan di Kabupaten Jayapura terdiri dari jumlah Sekolah Dasar (SD) sebanyak 128 unit, SMP sebanyak 43 unit dan SMU/SMK sebanyak 23 unit, serta Perguruan Tinggi sebanyak 6 unit.

Tabel.4.2
Jumlah Sekolah menurut Jenis/Jenjang
di Kabupaten Jayapura

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH	
1	SD	128	UNIT
2	SLTP	43	UNIT
3	SMU	23	UNIT
4	PT	6	UNIT
JUMLAH		200	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jayapura.

Sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Jayapura terus dibenahi dan usaha peningkatan sumberdaya terus dilakukan dengan dukungan pemerintah daerah. Sementara bagi pengelola pendidikan swasta lebih banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga atau yayasan keagamaan. Seperti lembaga pendidikan yang dikelola oleh Kristen (YPK), Yayasan Katolik (YPPK) dan Islam (YPKP dan YAPIS, Insan Cendikia Jayapura) dan lainnya. Bagi migran di Kabupaten Jayapura ada kecenderungan untuk menyekolahkan anak-anak mereka di lembaga-lembaga keislaman dengan alasan bahwa ada tambahan materi yang berupa pengetahuan agama yang relatif cukup porsinya yang didapat di lembaga tersebut sehingga ada nilai plus yang didapatkan dibandingkan dengan menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah negeri di bawah naungan dinas pendidikan kabupaten.

4.3.1.3.Keagamaan

Papua sebagaimana dengan wilayah-wilayah lainnya adalah wilayah dengan yang mempunyai tingkat heterogenitas agama yang tinggi yang telah diakui negara. Kabupaten Jayapura sejak berdirinya telah ada agama yang dibawa oleh para misionaris dan pendakwah. Keragaman penduduk Kabupaten Jayapura yang multi religius bisa dilihat dari beberapa agama yang dianut, yaitu Kristen yang menempati urutan terbanyak sebesar 80.384 jiwa (65.43%) dan paling sedikit adalah agama Hindu sebanyak 144 jiwa (0,12). Data yang diambil dari BPS Kabupaten Jayapura, tahun 2017 memperlihatkan prosentase jumlah penduduk menurut pemeluk agama yang ada sebagaimana pada (tabel 4.3) Keragaman dalam suatu daerah perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dan stake holder lainnya, sebab kadang dinamika interaksi antar kelompok agama yang ada, pada satu sisi dapat berpotensi meningkatkan solidaritas dan integrasi sosial kelompok. Tetapi pada sisi lain dapat terjadi gesekan karena faktor sosial, ekonomi bahkan politik.

Tabel. 4.3
Jumlah dan Persentasi Pemeluk Agama Tahun 2017

AGAMA	JUMLAH	%
Islam	35.970	29.28
Kristen	80.384	65.43
Katolik	6.063	4.94
Hindu	144	0.12
Budha	285	0.23
DII	-	-
TOTAL	122.846	100

Sumber Data : Diolah dari data BPS Kabupaten Jayapura Tahun 2017

Upaya agama-agama untuk membina umatnya, maka didirikanlah rumah ibadah dan sebagai wadah untuk aktifitas rutin keagamaan yang biasanya diramaikan dengan banyak prosesi keagamaan menurut tata cara masing-masing pemeluknya. Masing-masing ada gereja bagi agama Protestan dan Katolik, masjid dan mushala bagi pemeluk agama Islam, pura bagi penganut agama Hindu, serta wihara bagi penganut agama Budha. Rumah ibadah tersebut terbanyak adalah gereja Protestan yang memiliki banyak umat dan denominasi atau sekte/aliran. Masing-masing denominasi atau sekte/aliran tersebut mendirikan gereja sebagai bentuk pelayanan kepada umatnya. Kemudian masjid dan mushala juga banyak berdiri seiring dengan jumlah umat Islam kian hari kian bertambah sehingga membutuhkan tempat peribadatan yang mampu menampung jamaahnya dalam melaksanakan ibadah lima kali sehari semalam.

Tabel 4.4
Jumlah Tempat Ibadah Penduduk Kabupaten Jayapura

AGAMA	2014	%	2015	%	2016	%
ISLAM	43	10,19	43	10,19	73	12,46
KRISTEN	361	85,55	361	85,55	495	84,47
KATOLIK	14	3,32	14	3,32	14	2,39
HINDU	1	0,24	1	0,24	1	0,17
BUDHA	3	0,71	3	0,71	3	0,51
TOTAL	422	100	422	100	586	100

Sumber : BPS (Jayapura dalam angka tahun 2016)

Pendirian rumah ibadah dimaksudkan pemeluknya dapat mengimplementasikan nilai-nilai agama dan membumi pada berbagai bidang kehidupan sosial keagamaan serta kegiatan – kegiatan lain yang dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Di sanalah fungsi dari rumah ibadah yang sesungguhnya, yang kemudian para migran juga banyak menggunakan sebagai sarana untuk memperkuat modal (sosial, budaya dan simbolik) dan agama-agama tersebut mempertahankan eksistensi mereka dalam menghadapi dinamika yang terjadi di sekitar. Dari sana pula mereka dapat memperoleh informasi yang penting untuk kepentingan soliditas mereka.

4.3.2. Kondisi Politik

Kabupaten Jayapura sebagaimana dengan daerah-daerah lain di Indonesia adalah wilayah yang warganya beragam Partai politik. Konsekuensi dari keragaman partai diikuti oleh keragaman masyarakatnya dalam afiliasi di alam demokrasi.

Masyarakat diberi hak kebebasan dalam menentukan pilihan kepada partai mana yang diinginkan untuk dijadikan saluran aspirasi politik baik yang berhaluan nasionalis maupun partai yang berdasarkan ideologi agama. Setiap lima tahunan partai-partai berhasil berkontestasi dengan hasil anggota legislatif yang mewakili konsituennya masing-masing.

Mengacu pada pemilu tahun 2014 yang diikuti 12 partai politik dan pemilu lima tahun sebelumnya tahun 2009 yang diikuti oleh 17 partai politik, memperlihatkan posisi partai masing-masing dalam perolehan kursi legislatif. Hasil ini merupakan bagian dari gambaran dari keadaan representasi politik lokal daerah dan aspirasi masyarakat kepada calon yang dipilihnya untuk menjadi anggota di legislatif seperti pada tabel berikut.

Tabel. 4.5
Partai Politik dan Perolehan Suara Anggota DPRD
Kabupaten Jayapura Hasil Pemilu Tahun 2014-2019

NO	PARTAI POLITIK	DAPIL I	DAPIL II	DAPIL III	DAPIL IV	JUMLAH SUARA	(%)	JUMLAH KURSI
1	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	9.572	2.579	3.043	2.071	17.265	18,84	6
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3.772	1.099	981	1.949	7.801	8,51	2
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2.833	652	663	1.163	5.311	5,79	1
4	PARTAI PDI PERJUANGAN	2.914	1.585	1.430	1.658	7.587	8,28	4
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	6.235	1.949	1.412	1.448	11.044	12,05	3
6	PARTAI GERINDRA	2.840	1.367	1.628	1.656	7.491	8,17	3
7	PARTAI DEMOKRAT	4.172	1.393	1.928	1.754	9.247	10,09	4
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	2.816	1.180	1.478	1.576	7.050	7,69	1
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.556	1.163	583	688	3.990	4,35	1
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3.332	1.125	1.342	1.545	7.344	8,01	
11	PARTAI BULAN BINTANG	794	306	534	1.106	2.740	2,99	

12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1.929	876	816	1.158	4.779	5,21	
JUMLAH		42.765	15.274	15.838	17.772	91.649		25

Sumber : KPUD Kabupaten Jayapura, 2015

Hasil pemilu tahun 2014-2019 memperlihatkan dari 12 kontestan partai politik yang ada hanya 9 partai politik yang berhasil menduduki 25 kuota kursi legislatif Kabupaten Jayapura dari 4 daerah pemilihan, sementara pada pemilu sebelumnya periode tahun 2009 – 2014 dari 17 partai politik peserta pemilu yang bersaing semuanya dapat memperoleh kursi di legislatif dari 25 kuota yang ada sebagaimana pada (tabel. 4.5; 46).

Tabel. 4.6
Partai Politik dan Perolehan Suara
Anggota DPRD Kabupaten Jayapura
Periode 2009 – 2014

NO	PARTAI POLITIK	DAPL I	DAPIL 2	JUMLAH SUARA	(%)	JUMLAH KURSI
1	PARTAI GOLKAR	4.249	4.519	8.768	26,95	4
2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1.428	2.655	4.083	12,55	3
3	PARTAI DEMOKRAT	1.884	2.119	4.003	12,31	2
4	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.011	1.190	2.201	6,77	2
5	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	928	1.048	1.976	6,07	2

6	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN Indonesia	1.427		1.427	4,39	1
7	PARTAI PATRIOT		1.245	1.245	3,83	1
8	PARTAI BURUH		1.049	1.049	3,22	1
9	PARTAI HANURA	1.078		1.078	3,31	1
10	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	1.009		1.009	3,10	1
11	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA		938	938	2,88	1
12	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME		910	910	2,80	1
13	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN Indonesia		829	829	2,55	1
14	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	808		808	2,48	1
15	PARTAI PERSATUAN DAERAH		765	765	2,35	1
16	PARTAI N KEDAULATAN		723	723	2,22	1
17	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL		718	718	2,21	1
JUMLAH		13.822	18.708	32.530		25

Sumber : Diolah dari data Kesbang Pol Linmas Kabupaten Jayapura, 2009

Sementara dalam pemerintahan Kabupaten Jayapura Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur pemerintah atau eksekutif yang bertugas sebagai abdi negara dalam melayani masyarakat menjadi pilar dari pelaksanaan pembangunan pada suatu daerah. Data tahun 2018 jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada sebanyak 3997 orang. Jumlah ini bila diklasifikasi berdasarkan Papua dan Migran di semua satuan

kerja, menunjukkan bahwa data di bawah ini mengalami banyak dinamika dalam jumlah pegawai antara Orang Asli Papua dan Migran di semua satuan kerja. Jumlah ini masih termasuk pegawai yang diterima sebelum berlakunya otonomi khusus Papua seperti pada tabel berikut.

Tabel. 4.7
Jumlah Pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jayapura

NO	SATUAN KERJA	ASAL DAERAH				
		PAPUA	(%)	MIGRAN	(%)	JUMLAH
1	Sekretariat Daerah	52	40,63	76	59,38	128
2	Sekretariat DPRD	13	38,24	21	61,76	34
3	Dinas	1201	39,39	1848	60,65	3049
4	Badan	108	43,03	143	56,97	251
5	Distrik	320	69,36	144	31,03	470
6	Inspektorat	7	21,21	26	78,79	33
7	SATPOL PP	22	68,75	10	31,25	32
TOTAL JUMLAH		1.729		2268		3997

Sumber: Diaolah dari data kepegawaian tahun 2018

Semangat otonomi khusus kemudian banyak mempengaruhi posisi-posisi yang strategis di pemerintahan. Dapat dilihat pada posisi jabatan-jabatan struktural yang ada di pemerintahan Kabupaten Jayapura yang menggambarkan berbagai posisi strategis tersebut telah didominasi oleh Orang Asli Papua seperti pada data tabel yang ada seperti berikut.

Tabel. 4.8
Jabatan Struktural, Pemerintah Kabupaten Jayapura

NO	URAIAN	PAPUA	(%)	MIGRAN	(%)	JUMLAH
1	Eselon I					
2	Eselon II	20	62,5	12	37,5	32
3	Eselon III	79	46,20	92	53,80	171
4	Eselon IV	267	60,54	174	39,46	441
	JUMLAH	366		278		644

Sumber: Diolah dari data kepegawaian tahun 2018
Data ini memperlihatkan Posisi strategis telah memberi ruang bagi orang Papua untuk menjadi tuan di negeri sendiri, sementara bagi migran harus mengkreasi dirinya dengan nilai-nilai yang ada pada mereka untuk tetap bertahan dan berhadapan dengan situasi birokrasi pemerintahan pasca pemberlakuan otonomi khusus Papua.

4.3.3. Kondisi Ekonomi

Secara umum, kondisi ekonomi di Kabupten Jayapura tergambar dari besaran capaian PDRB, baik PDRB menurut lapangan usaha maupun PDRB Perkapita. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayapura sampai dengan tahun 2015 sebesar 11,74 % dengan nilai PDRB perkapita sebesar Rp. 57.112,53 rupiah atau dengan laju pertumbuhan sebesar 11,19 %. Kontribusi pertumbuhan ekonomi didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yang diikuti oleh Sektor Kontruksi dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta jasa lainnya.

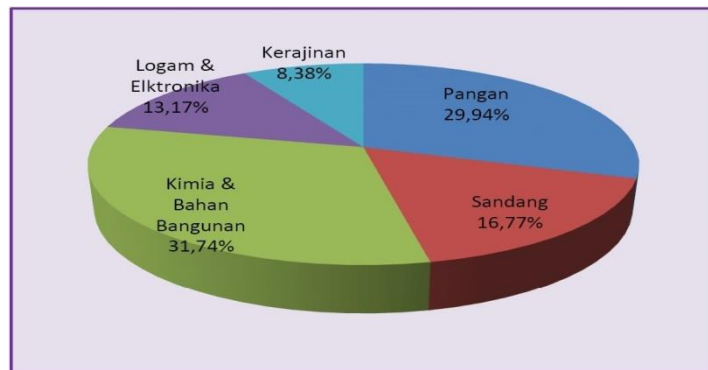
Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 23,61 persen. Sub lapangan usaha Perikanan merupakan penyumbang terbesar, yaitu sebesar 54,17 persen dari seluruh

nilai tambah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Nilai kontribusi rata-rata sub lapangan usaha pertanian sebesar 52,47 persen selama kurun waktu lima tahun terakhir.

Sementara sektor Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM terlihat dari sejauhmana peran Pemerintah dalam memfasilitasi pertumbuhan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Proporsi Industri Kecil dan Menengah terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu Industri Kerajinan, Industri Logam dan Elektronik, Industri Pangan, Industri Sandang, serta Industri Kimia dan Bahan Bangunan. Pertumbuhan industri kecil dan menengah lebih didominasi sektor Pangan sebesar 29,49 %, diikuti dengan Kimia dan Bahan Bangunan, sementara pertumbuhan terendah ada pada sektor Industri Kerajinan.

Gambar. 4.4

Proporsi Industri Kecil dan Menengah Menurut Jenis di Kabupaten Jayapura Tahun 2017



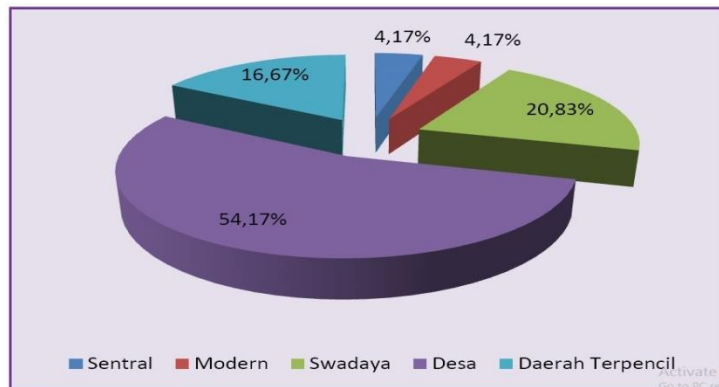
Sumber : BPS Kab Jayapura, 2016

Dari proporsi Industri Kecil dan Menengah yang ada, maka penyebaran kedua jenis industri tersebut lebih banyak terpusat di Distrik Sentani, karena sebagai wilayah perkotaan yang didominasi oleh Industri Pangan. Alasannya tentu karena kepadatan jumlah penduduk dan kecenderungan masyarakat untuk mencari makanan yang cepat atau siap saji yang dilihat oleh pelaku usaha sebagai pangsa pasar yang menarik keuntungan. Sementara Industri

dan UKM serta koperasi di Kabupaten Jayapura, menurut data yang ada secara keseluruhan terhadap 979 sarana usaha, baik berskala besar, menengah dan kecil dengan proporsi kepemilikan masih didominasi oleh migran (sebanyak 749 atau kurang lebih 76,51 %, dari total sarana usaha), sedangkan jumlah sarana berdasarkan kepemilikan untuk Orang Asli Papua sebanyak 230 atau kurang lebih 23,49 % dari total jumlah sarana usaha yang ada di Kabupaten Jayapura. Bidang ini bila dilihat persentasenya terlihat lebih dikuasai oleh para migran dari berbagai jenis usaha.

Sementara itu, bila dilihat penguasaan pasar menurut jenisnya, di wilayah Kabupaten Jayapura setidaknya terdapat 5 (lima) jenis pasar dengan proporsi terbesar adalah Pasar Desa 54,17 % dan proporsi terkecil adalah pasar Modern dan Pasar Sentral 4,17 % seperti pada gambar berikut.

Gambar 4.5
Data Pasar di Kabupaten Jayapura Tahun 2017



Sumber : BPS Kab. Jayapura, 2016

Pada (gambar 4.5) tersebut di atas, dari 5 jenis pasar yang ada, maka 3 jenis pasar yang ada (pasar Desa, pasar daerah terpencil dan swadaya) adalah pasar yang kebanyakan baik penjual maupun pembeli dari kalangan Orang Asli Papua

dan waktu aktivitas pasarnya tidak setiap hari. Sementara Pasar Sentral Phaara, modern adalah pasar yang berada pada kota Sentani yang dikuasai oleh migran dan Orang Asli Papua sebagai besar konsumen.